

Daftar Pustaka

- Anonim. 2012. "Jaksa Langsung Tahan Perangkat Desa." *Suara Merdeka*, 5 September. Diakses pada 10 November 2016. <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/09/05/197618/Jaksa-Langsung-Tahan-Perangkat-Desa->.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014 Buku II Pemeriksaan Laporan Keuangan." Diakses pada 13 Agustus 2016. http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2014/I/ihps_i_2014_1414644515.pdf.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2013.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. "Pendapat BPK tentang Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah." Diakses pada 14 Agustus 2016. http://www.bpk.go.id/assets/files/otherpub/2015/otherpub__2015_1435739026.pdf.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2017.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2016. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Creswell, John. W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Diakses pada 13 Agustus 2016. http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Pedoman_Umum_Pengelolaan_PBB_P2.pdf.
- Direktur Jenderal Pajak. 2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-07/PJ/2013 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak.
- Donaldson, Lex, dan James H. Davis. 1991. "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns." *Australian Journal of Management*, Vol. 16 No. 1: 49-65.
- DPPKAD Kabupaten Banyumas. 2012. Rencana Strategis DPPKAD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018.
- Gan. 2015. "PBB Rawan Penyimpangan." *Radar Banyumas*, 17 Februari. Diakses pada 10 November 2016. <http://radarbanyumas.co.id/pbb-rawan-penyimpangan/>.
- Gleason, Cristi, Morton Pincus, dan Sonja Olhoft Rego. 2011 "Consequences of Material Weaknesses in Tax-Related Internal Controls for Financial Reporting and Earnings Management." *Research Gate Academic Journal*.
- Hamel, Gary. 2013. "Evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Piutang pada PT Nusantara Surya Sakti." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 1 No. 3: 274-281.
- Hernandez, M. 2012. "Toward an Understanding of the Psychology of Stewardship". *Academy of Management Review*, Vol 37 No. 2: 172-193.
- Ida. 2015. "Perangkat Desa Diduga Gelapkan PBB." *Radar Banyumas*, 10 Maret. Diakses pada 10 November 2016. <http://radarbanyumas.co.id/perangkat-desa-diduga-gelapkan-pbb/>.
- Kamarudin, Jamaludin. 2015. "Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pemungutan Retribusi Parkir Pada Kabupaten Sleman." Tesis Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2014. *Buletin Teknis*. Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Mastuti, I Gusti Ayu Komang Rai. 2015. "Evaluasi Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)." Tesis Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
- Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. 2010. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah.
- Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. 2014. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah.
- Menteri Keuangan. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2011. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.
- Moeller, Robert. 2009. *Brink's Modern Internal Auditing A Common Body of Knowledge*. Hoboken, New Jersey: John Willey & Sons.
- Mulyadi. 2009. *Auditing*. Edisi Keenam Buku I. Jakarta: Salemba Empat.
- Murwaningsari, Ety. 2009. "Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial dalam Satu Continuum." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1 No. 11: 30-41.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. 2011. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. 2016. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. 2010. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

- Pemerintah Kabupaten Banyumas. 2012. Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan PBB-P2.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. 2016. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
- Ratuela, Gilbert Jacob, Grace B. Nangoi, dan Harijanto Sabijono. 2015. "Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah di Kota Bitung." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15 No. 5: 34-45.
- Republik Indonesia, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ritonga, Irwan Taufiq dan Ehrmann Suhartono. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah (Sesuai PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah.
- Soemitro, Rochmat. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: PT Eresco.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 2013. "Internal Control-Integrated Framework Executive Summary." Diakses pada 19 Desember 2016. <https://www.coso.org/Documents/990025P-Executive-Summary-final-may20.pdf>.